



Tindaklanjut Arahan Presiden Pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2018 & Review Evaluasi Kinerja TPID 2017 (Award 2018)

Disampaikan Oleh:

Ir. DIAH INDRAJATI, M.Sc

Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri

Selaku

Ketua Kelompok Kerja Daerah TPIP

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah
Tahun 2018

Hotel Ambhara Jakarta | 16 Oktober 2018





**ARAHAN PRESIDEN RAKORNAS
PENGENDALIAN INFLASI 2018
TINDAKLANJUT**



4K



Pokok Arahan Presiden Republik Indonesia Pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2018

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



KETERJANGKAUAN HARGA

Mendorong efektivitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga.

KETERSEDIAAN PASOKAN

Memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional.

KELANCARAN DISTRIBUSI

- Mendorong perdagangan antardaerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan di daerah.
- Membangun dan mensinkronkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi

KOMUNIKASI EFEKTIF

- Memantau pergerakan harga, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta untuk mengatasi informasi asimetris
- Mengintensifkan pemantauan lapangan dibandingkan kegiatan yang bersifat administrative.
- Menjaga mekanisme pasar dengan bantuan jajaran kepolisian dan aparat keamanan, khususnya dalam mengatasi penimbunan bahan pangan.



USULAN TINDAKLANJUT ARAHAN PRESIDEN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



**KETERJANGKAUAN
HARGA**



Mendorong efektivitas pemanfaatan APBD melalui percepatan realisasi dan melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga.

USULAN TINDAKLANJUT :

Mendorong Pemda untuk dapat melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi harga dengan memanfaatkan APBD

Sinkronisasi program antar K/L dengan Pemerintah Daerah dan antar daerah terkait substansi pengendalian inflasi atau kestabilan harga barang dan jasa melalui forum Rakortek RKP-RKPD

Pemanfaatan aplikasi *e-monev* Bappenas dalam rangka memastikan realisasi program K/L yang mendukung pengendalian inflasi di pusat dan daerah.



USULAN TINDAKLANJUT ARAHAN PRESIDEN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



KETERSEDIAAN PASOKAN



Memperhatikan sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan biaya operasional.

USULAN TINDAKLANJUT :



Mendorong Pemda untuk meningkatkan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal) termasuk melakukan optimalisasi bantuan sarana produksi, perbaikan sistem budidaya, dan peningkatan investasi untuk produksi ternak sapi

Mempercepat pemanfaatan PMN Bulog untuk infrastruktur pasca panen

Mempercepat realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk pembebasan lahan oleh Pemda

Mendorong transisi kelembagaan petani menjadi lembaga ekonomi petani a.l melalui contract farming.



USULAN TINDAKLANJUT ARAHAN PRESIDEN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



KELANCARAN DISTRIBUSI

Mendorong perdagangan antardaerah dalam rangka menjaga pasokan komoditas pangan di daerah

Membangun dan mensinkronkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas akses pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi

USULAN TINDAKLANJUT :

Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, antara lain dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD

Pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di sentra produksi di Jawa dan luar Jawa.



USULAN TINDAKLANJUT ARAHAN PRESIDEN



KOMUNIKASI EFEKTIF



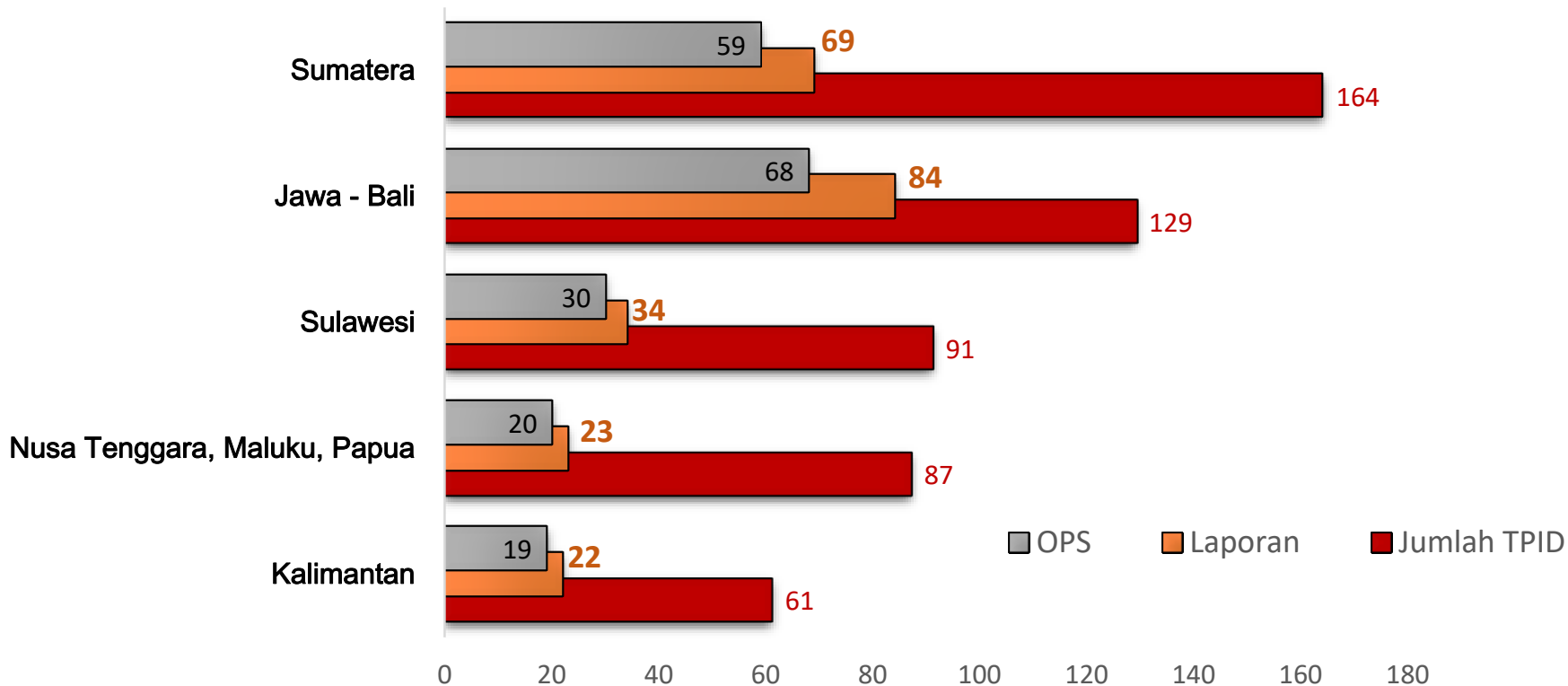
POKOK ARAHAN	USULAN TINDAKLANJUT
Memantau pergerakan harga, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi, untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan respon atas perubahan harga serta untuk mengatasi informasi asimetris	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, termasuk data stok • Meningkatkan korelasi data PIHPS dan BPS • Mendorong TPID dan Pemda untuk memanfaatkan data PIHPS untuk keperluan pemantauan dan stabilisasi harga
Mengintensifkan pemantauan lapangan dibandingkan kegiatan yang bersifat administrative	Melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID dalam melakukan pemantauan lapangan
Menjaga mekanisme pasar dengan bantuan jajaran kepolisian dan aparat keamanan, khususnya dalam mengatasi penimbunan bahan pangan	Melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait pengendalian inflasi daerah

The background features a complex network of interconnected nodes and lines. The top-left portion is rendered in shades of orange and red, while the bottom-left portion is in shades of blue. A solid dark red rectangular block is positioned on the right side of the page, containing the main title text in white.

**REVIEW EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA
TPID 2017 (AWARD 2018)**

PARTISIPASI DALAM EVALUASI KINERJA TPID 2017

- Tingkat partisipasi wilayah Jawa-Bali dalam menyampaikan laporan TPID paling tinggi (61,1%) sedangkan paling rendah di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (26,43%). Begitu pula dengan penyampaian dokumen inovasi program unggulan/OPS
- Dari 82 kab/kota IHK, ada 26 daerah atau 32,1% yang tidak menyampaikan laporan baik dokumen atau OPS dengan urutan wilayah tertinggi yaitu Jawa Bali (9,9%), Nusra Mapua (8,6%), Sulawesi (7,4%), dan Sumatera (6,2%)
- TPID di Provinsi Maluku Utara yang berpartisipasi dalam evaluasi kinerja TPID 2017 hanya Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan



Ket:

*) Dokumen merupakan laporan terkait komponen koordinasi, rekomendasi kebijakan, dan akuntabilitas

***) OPS merupakan laporan terkait komponen inovasi program unggulan

Sumber: Sekretariat TPIP

EVALUASI KINERJA TPID 2017 (AWARD 2018)

a. Realisasi Inflasi
(Bobot 20%)

OUTCOME

40%

b. Volatilitas Inflasi
(Bobot 20%)

PROSES

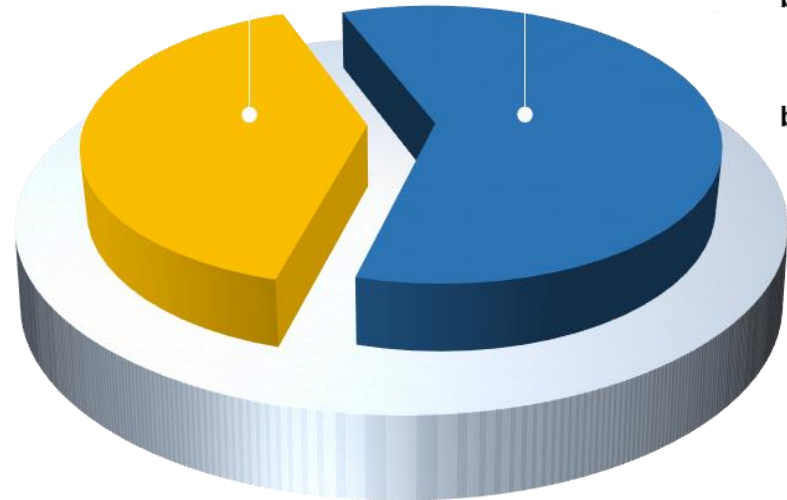
60%

a. Koordinasi
(Bobot 10%)

b. Rekomendasi
kebijakan
(Bobot 10%)

b. Inovasi Program
(Bobot 30%)

b. Akuntabilitas
(Bobot 10%)



KELOMPOK IHK
(kategori Provinsi dan Kab/Kota terbaik)

PROGRAM
UNGGULAN

a. Inovasi
Program
(Bobot 60%)

60%

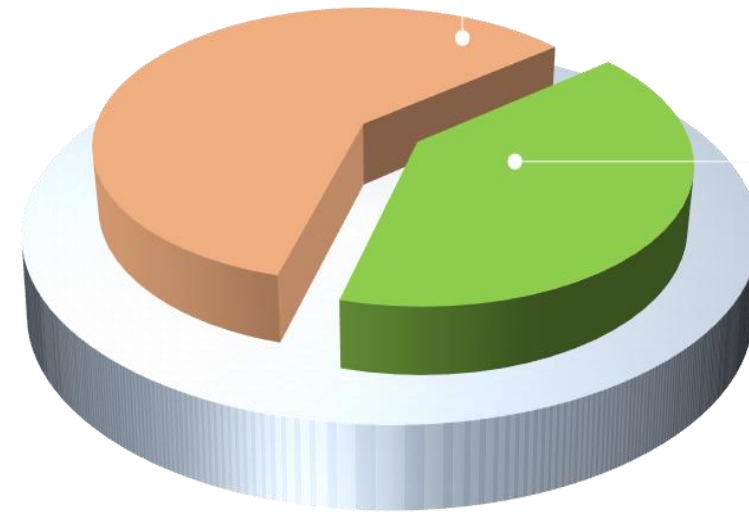
PROSES

40%

a. Koordinasi
(Bobot 10%)

b. Rekomendasi
Kebijakan
(Bobot 20%)

c. Akuntabilitas
(Bobot 10%)



KELOMPOK NON IHK
kategori TPID Kab/Kota berprestasi

PENJABARAN KRITERIA EVALUASI KINERJA PER KOMPONEN

Komponen Koordinasi

kegiatan	kriteria	Nilai per kegiatan
Rapat High Level Meeting	• Rapat yang dipimpin Kepala Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat	3
	• Rapat dipimpin minimal oleh Sekretaris Daerah dan merumuskan kebijakan TPID serta dibuktikan dengan risalah rapat.	1
Rakor antar Kab/ Kota	• Rapat dipimpin oleh Kepala Daerah, dibuktikan dengan risalah rapat	3
	• Rapat dipimpin Sekda Provinsi, dibuktikan dengan risalah rapat	1
Kegiatan Capacity Building yang diinisiasi oleh Kab/ Kota	• Jenis Kegiatan: Workshop, Sosialisasi, Studi Banding	1

Komponen Rekomendasi Kebijakan

kegiatan	kriteria	Nilai per kegiatan
Nota Dinas Rekomendasi Kebijakan	Disampaikan kepada kepala daerah berdasarkan hasil pertemuan TPID	2
Pelaksanaan Kebijakan di daerah	Penyusunan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi Daerah (misal Surat Edaran tentang Pelaksanaan Operasi Pasar, SE tentang Pasar Lelang, Kerjasama Antar Daerah, dll)	3

Komponen Akuntabilitas

Kegiatan	Kriteria	Nilai per kegiatan
Laporan TPID	Laporan TPID sebagaimana diatur dalam Inmendagri 027/1696/SJ dan/atau Permenko No 10 Tahun 2017	2

Ket.: Nilai per kegiatan dikalikan dengan frekuensi

Komponen Inovasi Program

	KRITERIA PENILAIAN				Total nilai
	Latar belakang pemilihan program	Aspek Kerjasama (antar daerah atau stakeholders lain)	Aspek Pembiayaan	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	
Rentang Score	10 – 15	10 – 25	10 – 25	10 – 35	40 – 100

HASIL EVALUASI KINERJA TPID 2017 (AWARD 2018)



TPID PROVINSI TERBAIK

Kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Manuspua

- ★ Kawasan Sumatera: Provinsi Sumatera Barat
- ★ Kawasan Jawa Bali: Provinsi Jawa Tengah
- ★ Kawasan Kalimantan: Provinsi Kalimantan Barat
- ★ Kawasan Sulawesi: Provinsi Sulawesi Utara
- ★ Kawasan Manuspua: Provinsi Nusa Tenggara Timur

TPID KABUPATEN/KOTA TERBAIK

Kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Manuspua

- ★ Kawasan Sumatera: Kota Padang
- ★ Kawasan Jawa-Bali: Kota Kediri
- ★ Kawasan Kalimantan: Kota Samarinda
- ★ Kawasan Sulawesi: Kota Makassar
- ★ Kawasan Manuspua: Kota Ternate

TPID KABUPATEN/KOTA BERPRESTASI

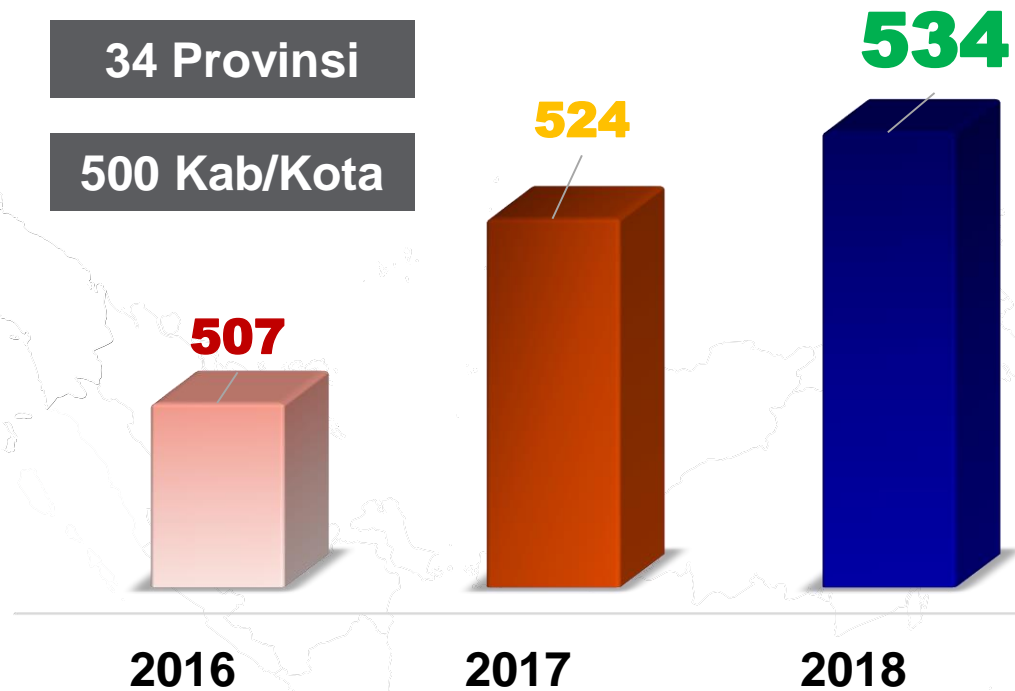
Kawasan Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Manuspua

- ⌘ Kawasan Sumatera: Kabupaten Deli Serdang
- ⌘ Kawasan Jawa-Bali: Kabupaten Bangli
- ⌘ Kawasan Kalimantan: Kabupaten Banjar
- ⌘ Kawasan Sulawesi: Kota Bitung
- ⌘ Kawasan Manuspua: Kabupaten Manggarai Timur

(*) Pembagian wilayah baru (Kawasan Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Manuspua)

PENGUATAN KELEMBAGAAN TPID DI SELURUH INDONESIA

Upaya pembentukan TPID di seluruh daerah dilaksanakan untuk menindaklanjuti Arahan Presiden



Masih terdapat 8 Daerah Yang Belum Membentuk TPID



- ***TIIP melalui Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat Nomor 500/4930/SJ dan 500/4931/SJ tentang Percepatan Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Gubernur Maluku Utara dan Papua Barat.***
- ***Selain itu, TIIP melalui Pokja Daerah secara proaktif akan melakukan pembinaan dan sekaligus memberikan Capacity Building kepada 8 Daerah Otonom yang belum membentuk TPID***

KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

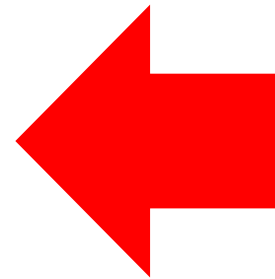
TPID PROVINSI	
Ketua	Gubernur , dan bertindak sebagai pelaksana harian tugas TPID Provinsi oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Wakil Ketua	Kepala Perwakilan BI
Sekretaris	Kepala Biro yang membidangi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi
Anggota	Kepala Perangkat Daerah di Provinsi yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu

TPID KABUPATEN/KOTA	
Ketua	Bupati / Walikota dan bertindak sebagai pelaksana harian tugas TPID Provinsi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Wakil Ketua	Pejabat Kantor Perwakilan BI
Sekretaris	Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Perekonomian
Anggota	Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perdagangan, pertanian, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, statistik dan perangkat daerah lainnya yang dianggap perlu

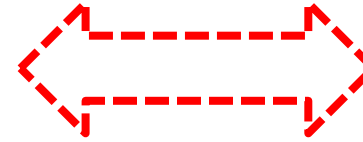
Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu

Bupati/Walikota dalam menunjuk wakil ketua, melakukan koordinasi secara tertulis kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia di wilayahnya masing-masing

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

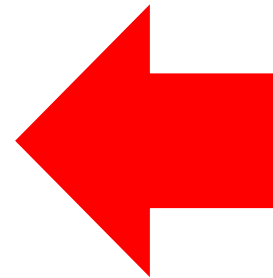


Menteri Dalam Negeri

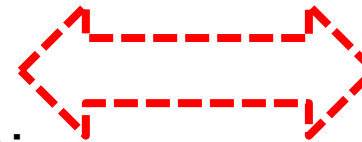


Menko Perekonomian, Gubernur BI dan Menteri/Pimpinan lembaga terkait

Pembinaan & Pengawasan penyelenggaraan tugas TPID Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan menteri/pimpinan lembaga terkait



Gubernur Provinsi



Menteri/ Pimpinan lembaga terkait

Pembinaan & Pengawasan penyelenggaraan tugas TPID Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait

* Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui rapat koordinasi daerah, regional dan nasional, fasilitasi dan supervisi serta monitoring dan evaluasi

TPID DALAM PENGENDALIAN INFLASI

1 Penetapan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Keppres 23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Pusat

2 Melakukan analisis bersama dengan Bank Indonesia untuk mengali informasi terkait penyebab inflasi di wilayah tersebut

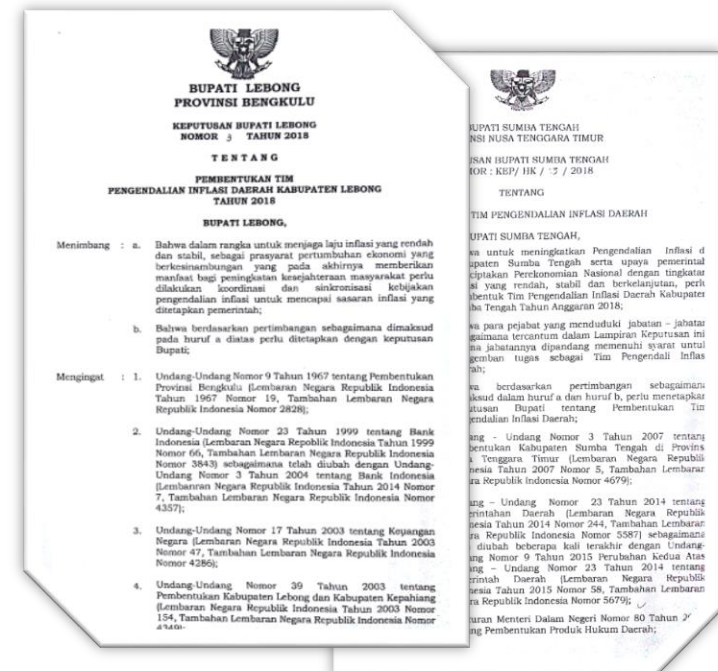
3 Penyusunan program kerja bersama dengan seluruh anggota TPID (SKPD dan pihak terkait). Inventarisir program-program SKPD yang terkait dengan pengendalian inflasi untuk kemudian dimusyawarahkan program mana yang akan fokus program kerja unggulan TPID

4 Melaksanakan *capacity building* antara lain:

1. ekspolarasi website pokjanastpid.id – pedoman, peraturan, publikasi, analisis inflasi, penyampaian surat ke daerah, modul, paparan dll

2. Studi banding ke TPID terbaik/berprestasi

Catatan: website pokjanastpid.id dalam pengembangan dan direncanakan berubah nama menjadi tpin.id



FOKUS TPID TERHADAP PROGRAM 4K

KETERSEDIAAN PASOKAN

Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan konektivitas, mempercepat proses pembebasan lahan, serta Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan

KELANCARAN DISTRIBUSI

Mendorong perdagangan antardaerah dengan melibatkan peran swasta, untuk menurunkan disparitas inflasi antar wilayah di Indonesia.

KETERJANGKAUAN HARGA

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pangan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, untuk perbaikan efektivitas kebijakan.

KOMUNIKASI EFEKTIF

Memperkuat sinergi program dan kebijakan Pusat dan Daerah.

Sosialisasi belanja bijak, penyampaian ketersediaan barang kepada masyarakat dengan melibatkan peran media.

Rata-rata dan
volatilitas
inflasi VF
menurun

Memperkecil
disparitas
inflasi antar
daerah di
Indonesia.

FOKUS TPID DALAM PENGENDALIAN INFLASI

1

INFRASTRUKTUR

(akses dan konektivitas)

- Pemanfaatan APBD dan Dana Desa untuk mendukung Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, pasar dan konektivitas (akses sentra produksi pertanian, irigasi tersier) dgn juga dana desa
- Dukungan Pembebasan lahan utk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas Pemerintah

KEGIATAN RUTIN

5

- Operasi Pasar tepat sasaran (waktu dan lokasi), termasuk optimalisasi APBD
- Koordinasi dengan TPID Provinsi dan TPID daerah lain dalam hal Kerjasama antar daerah, Capacity building dan sinergi program
- Tertib dalam administrasi kegiatan
- Pelaksanaan pertemuan rutin anggota TPID (analisis, mitigasi, dan evaluasi)
- Pengeloan ekspektasi masyarakat, moral suasion dan edukasi masyarakat
- Monitoring dan evaluasi hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengendalian iflasi (4K), termasuk kebijakan pengendalian dampak kebijakan AP
- Koordinasi Peta jalan 2019-2021 dgn Provinsi & Pusat
- Monitoring harga, produksi, stok secara rutin; Integrasi data ke provinsi dan pusat; dan Pembangunan EWS (koordinasi dengan Provinsi)

TANTANGAN

- Program kerja : Keberlanjutan, kesesuaian dengan karakteristik daerah, sinergi dgn daerah lain/pusat dan Dukungan anggaran
- Rotasi Personel (termasuk Kepala Daerah)
- Komitmen kuat stakeholders (Ka. Daerah SKPD, DPRD)
- Pengelolaan BUMD secara profesional

SARANA PRODUKSI (DAERAH PRODUSEN)

(alsintan, pupuk, bibit, dll)

2

- Memastikan ketepatan sasaran dan *timing* distribusi pupuk, bibit dengan periode masa tanam
- Penguatan alsintan untuk mendukung paska panen guna meningkatkan nilai tambah produksi
- Pemanfaatan APBD dan Dana desa

3

MANAJEMEN PRODUKSI

(kelembagaan, pengelolaan produksi)

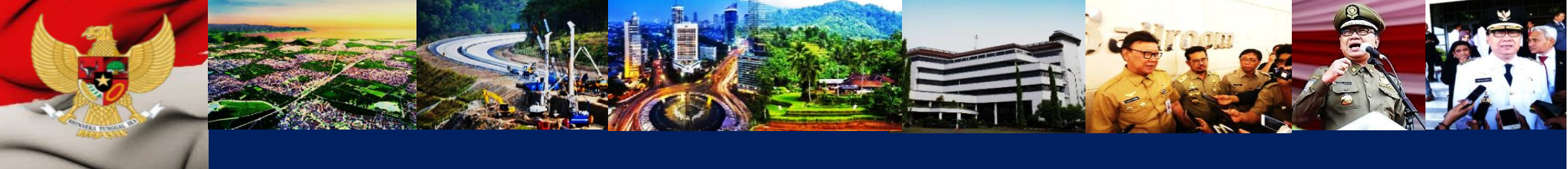
- Penguatan kelompok & kelembagaan petani (*corporate/cooperative farming*)
- Pengaturan pola tanam antar wilayah
- Peningkatan akses pasar bagi petani
- akses asuransi usaha pertanian, kartu tani dan pembiayaan

- Pengadaan sarpras yang mendukung ketersediaan antar waktu dan antar wilayah
- Pemanfaatan KAD
- Pemanfaatan Teknologi pertanian
- Penguatan basis data

4

MENJAMIN KETERSEDIAAN PANGAN

(antar waktu & wilayah)



TERMAKASIH